

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat, selanjutnya disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MENGINGAT hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk memfasilitasi pergerakan warga negara pemegang paspor diplomatik atau dinas dari kedua belah Pihak;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari Republik Indonesia wajib diizinkan untuk masuk, tinggal, keluar dan singgah di wilayah Meksiko Serikat tanpa visa untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi tiga puluh (30) hari sejak tanggal masuk.

2. Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari Meksiko Serikat wajib diizinkan untuk masuk, tinggal, keluar dan singgah di wilayah Republik Indonesia tanpa visa untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi tiga puluh (30) hari sejak tanggal masuk.

3. Apabila warga negara dari salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas, berkeinginan untuk tinggal diwilayah Pihak lain untuk suatu jangka waktu yang melebihi tiga puluh (30) hari, mereka diwajibkan untuk mendapatkan visa sebelum masuk kewilayah Pihak lain tersebut.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
PERSONIL YANG DIAKREDITASI UNTUK MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

1. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan konsuler di wilayah Meksiko Serikat, termasuk anggota keluarga mereka sebagaimana tercantum dalam ayat 3 Pasal ini, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Meksiko Serikat sebelum memasuki wilayah Meksiko Serikat dan mereka harus diakreditasi oleh Kementerian Luar Negeri Meksiko Serikat dalam tiga puluh hari (30) setelah memasuki negara tersebut.

2. Warga negara Meksiko Serikat, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan konsuler di wilayah Republik Indonesia, termasuk anggota keluarga mereka sebagaimana tercantum dalam ayat 3 Pasal ini, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia.

3. Perlakuan ini diberikan kepada pasangan, orang tua dari pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas atau orang tua dari pasangan, anak-anak yang belum menikah di bawah dua puluh lima (25) tahun dan dibawah perwalian dan/atau dalam status berkebutuhan khusus.

PASAL 4
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN NASIONAL

1. Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Pihak penerima selama berada diwilayah Pihak Penerima tersebut.

2. Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib masuk, keluar atau singgah di wilayah Pihak lain melalui titik-titik masuk yang dizinkan, sesuai dengan ketentuan imigrasi, bea cukai, keamanan dan sanitasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak lain tersebut.

PASAL 5
HAK PENOLAKAN

Masing-masing Pihak berhak menolak untuk memberikan izin masuk, atau memperpendek masa tinggal di wilayahnya, setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 1, yang dianggap *non grata*, khususnya yang menimbulkan bahaya bagi ketertiban umum, kesehatan, keamanan atau yang keberadaannya dalam wilayah Pihak tersebut ilegal.

PASAL 6
KEHILANGAN PASPOR

Apabila warga negara dari salah satu Pihak kehilangan paspor diplomatik atau paspor dinasnya di wilayah Pihak lain, misi diplomatik atau konsuler wajib segera memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari Pihak penerima untuk melakukan tindakan yang tepat, mengeluarkan pada saat yang sama paspor baru atau dokumen perjalanan kepada warga negara tersebut.

PASAL 7
PERTUKARAN CONTOH PASPOR

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, Para Pihak wajib bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor yang terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum berlakunya Persetujuan ini.

2. Dalam hal adanya modifikasi dalam paspor tersebut, Para Pihak wajib saling memberitahukan dan menyampaikan kepada Pihak lain contoh-contoh paspor tersebut, setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum mengumumkannya.

PASAL 8
PENANGGUHAN

1. Salah satu Pihak dapat, setiap saat, menangguhkan baik secara keseluruhan atau sebagian pemberlakuan Persetujuan ini karena alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat.

2. Penangguhan Persetujuan ini wajib segera dikomunikasikan melalui saluran diplomatik kepada Pihak lain, dengan menyebutkan tanggal kapan penangguhan atau pemberhentian penangguhan tersebut akan berlaku.

PASAL 9
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atas persetujuan bersama oleh para Pihak, yang disampaikan melalui komunikasi tertulis dimana dalam komunikasi tersebut harus disebutkan tanggal berlakunya perubahan tersebut.

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak.

PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku tiga puluh (30) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi dan Persetujuan ini wajib berlaku untuk periode yang tidak ditentukan.

2. Salah satu Pihak, dapat setiap saat, menyampaikan keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik dalam sembilan puluh (90) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Persetujuan ini.

Ditandatangani di Meksiko City, pada 14 April 2014, rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran mengenai ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

R.M. MARTY M. NATALEGAWA
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH
MEKSIKO SERIKAT

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA
Menteri Luar Negeri

REPUBLIK INDONESIA

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE LA EXENCIÓN DE VISA A TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS U OFICIALES / DE SERVICIO

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados en lo individual como una "Parte" y colectivamente como las "Partes";

RECONOCIENDO las relaciones de amistad que existen entre ambos Estados;

DESEANDO facilitar el tránsito de sus nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio;

DE CONFORMIDAD con las leyes y los reglamentos vigentes en ambos Estados;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1
EXENCIÓN DE VISA

1. Los titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio vigentes de la República de Indonesia podrán ingresar, permanecer, salir y transitar a través del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, sin tener que obtener una visa, por un periodo que no exceda de treinta (30) días, a partir de la fecha de ingreso.

2. Los titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales vigentes de los Estados Unidos Mexicanos podrán ingresar, permanecer, salir y transitar a

través del territorio de la República de Indonesia, sin tener que obtener una visa, por un periodo que no exceda de treinta (30) días, a partir de la fecha de ingreso.

3. Si los nacionales de cualquiera de las Partes, titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales/de servicio, desean permanecer en el territorio de la otra Parte por un periodo que exceda de treinta (30) días, deberán solicitar la visa correspondiente antes de ingresar al territorio.

ARTÍCULO 2
VIGENCIA DEL PASAPORTE

Los pasaportes de los nacionales de cualquiera de las Partes deberán tener una vigencia de al menos seis (6) meses anterior a su ingreso al territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 3
PERSONAL ACREDITADO ANTE UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA O CONSULAR

1. Los nacionales de la República de Indonesia, titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio vigentes, asignados como funcionarios a una Misión Diplomática o Consular ubicada en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como los miembros de sus familias que se listan en el numeral 3 del presente Artículo, requerirán obtener la visa correspondiente por parte de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, previo a su ingreso, y deberán ser acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos dentro de los treinta (30) días siguientes a su ingreso al país.

2. Los nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales vigentes, asignados como funcionarios a una Misión Diplomática o Consular ubicada en el territorio de la República de Indonesia, así como los miembros de sus familias que se listan en el numeral 3 del presente Artículo, requerirán obtener la visa correspondiente por parte de la Embajada de la República de Indonesia, previo a su ingreso.

3. Este tratamiento será extensivo al cónyuge, padres del titular o del cónyuge, así como a los hijos solteros menores de veinticinco (25) años, que se encuentren bajo su tutela legal y/o en estado de interdicción.

ARTÍCULO 4
LEGISLACIÓN NACIONAL

1. Los nacionales de cualquiera de las Partes, titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales/de servicio, deberán respetar las leyes y reglamentos de la Parte receptora durante su estancia en su territorio.

2. Los nacionales de una Parte, titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales/de servicio, deberán entrar, salir o transitar al territorio de la otra Parte a través de los puntos autorizados para el ingreso, de conformidad con las disposiciones migratorias, aduaneras, de seguridad y sanitarias establecidas por las autoridades competentes de la otra Parte.

ARTÍCULO 5
DERECHO A NEGAR EL INGRESO

Cada Parte se reserva el derecho de negar la entrada o reducir el período de estancia en su territorio, de cualquiera de las personas a que se refiere el Artículo 1, cuya presencia sea considerada *non grata*, en particular a aquellas personas que puedan representar un riesgo al orden público, a la salud pública o a la seguridad, o cuya presencia sea considerada ilegal en su territorio.

ARTÍCULO 6
PÉRDIDA DE PASAPORTE

Si un nacional de cualquiera de la Partes extravía su pasaporte diplomático u oficial/de servicio en el territorio de la otra Parte, la Misión Diplomática o Consular informará de inmediato a las autoridades correspondientes de la Parte receptora a fin de que tomen las medidas pertinentes, expidiendo, al mismo tiempo, un nuevo pasaporte o documento de viaje a su nacional.

ARTÍCULO 7
INTERCAMBIO DE EJEMPLARES

1. Para los propósitos del presente Acuerdo, las Partes intercambiarán, a través de la vía diplomática, al menos con treinta (30) días de anticipación a la entrada en vigor del presente Acuerdo, ejemplares detallados de los pasaportes a que se refiere el Artículo 1.

2. En caso de que se realice alguna modificación en los pasaportes mencionados, las Partes deberán notificarlo a la otra Parte y entregar los ejemplares correspondientes, al menos con treinta (30) días de antelación a su entrada en circulación.

ARTÍCULO 8
SUSPENSIÓN

1. Cualquiera de las Partes podrá en cualquier momento suspender de manera total o parcial la aplicación del presente Acuerdo por razones de seguridad nacional, orden público o salud pública.

2. La suspensión será notificada de manera inmediata a la otra Parte, a través de la vía diplomática, estableciendo la fecha en que la suspensión o su renovación surtirá efecto.

ARTÍCULO 9
ENMIENDAS

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a través de comunicaciones escritas, en las que se especifique la fecha de su entrada en vigor.

ARTÍCULO 10
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o implementación del presente Acuerdo será resuelta entre las Partes de manera amistosa, a través de consultas y negociaciones.

ARTÍCULO 11
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última notificación en que las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos internos exigidos para tal efecto, y permanecerá vigente de manera indefinida.

2. Cualquiera de las Partes podrá en cualquier momento dar por terminado el presente Acuerdo, mediante notificación escrita dirigida a la

otra Parte, a través de la vía diplomática, con noventa (90) días de antelación.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos han firmado el presente Acuerdo.

Firmado en la Ciudad de México, el 14 de abril de 2014, en dos ejemplares originales en idioma indonesio, español e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de cualquier diferencia en la interpretación, el texto en inglés prevalecerá.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA

R.M. MARTY M. NATALEGAWA
Ministro de Asuntos Exteriores

POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA
Secretario de Relaciones Exteriores



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties";

RECOGNIZING the friendly relations existing between both States;

DESIRING to facilitate the movement of their national holders of diplomatic, official or service passports;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in both States;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Holders of a valid diplomatic or service passport of the Republic of Indonesia shall be permitted to enter, stay, exit and transit through the territory of the United Mexican States for a period not exceeding thirty (30) days without visa from the date of entry.

2. Holders of a valid diplomatic or official passport of the United Mexican States shall be permitted to enter, stay, exit and transit through the territory of the Republic of Indonesia for a period not exceeding thirty (30) days without visa from the date of entry.

3. If nationals of either Party holding a diplomatic or official/service passport, wishes to stay in the territory of other Party for a period exceeding thirty (30) days, he/she shall require a visa before entering the territory.

ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least six (6) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 3
PERSONNEL ACCREDITED TO A DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

1. Nationals of the Republic of Indonesia holding valid diplomatic or service passports who are assigned as officials of a Diplomatic or a Consular Mission located in the territory of the United Mexican States, so as the members of their families listed in the paragraph 3 of this Article, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the United Mexican States prior to their entry, and they must be accredited to the Ministry of Foreign Affairs of the United Mexican States within thirty (30) days after entry into the country.

2. Nationals of the United Mexican States holding valid diplomatic or official passports who are assigned as officials of a Diplomatic or a Consular Mission located in the territory of the Republic of Indonesia, so as the members of their families listed in the paragraph 3 of this Article, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the Republic of Indonesia prior to their entry.

3. This treatment shall be extended to the spouse, parents of the holder or of the spouse, unmarried children under the age of twenty-five (25) years and who are under his/her legal guardianship and/or under interdiction status.

ARTICLE 4
NATIONAL LEGISLATION

1. Nationals of either Party, holders of diplomatic or official/service passports, must respect the laws and regulations of the receiving Party during their stay in its territory.

2. Nationals of a Party, holders of valid diplomatic or official/service passports, shall enter, exit or transit the territory of the other Party through authorized points of entry, in accordance with immigration, customs, security and sanitary provisions established by the competent authorities of the other Party.

ARTICLE 5
RIGHT TO REFUSE ENTRY

Each Party reserves the right to refuse the entry into, or shorten the duration of stay in its territory, of any persons referred to Article 1, whom it may consider *non grata*, in particular persons who may present a risk to public order, public health, security or whose presence within its territory is illegal.

ARTICLE 6
PASSPORT LOSS

If a national of either Party loses his/her diplomatic or official/service passport in the territory of the other Party, the Diplomatic or Consular Mission shall immediately inform the concerned authorities of the receiving Party for appropriate action, issuing at the same time a new passport or travel document to its national.

ARTICLE 7
EXCHANGE OF SPECIMENS

1. For the purposes of this Agreement, the Parties shall exchange, through diplomatic channels, detailed specimens of the passports referred to in Article 1, at least thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.

2. In case of any modification in the aforementioned passports, the Parties shall notify and provide each other Party the corresponding specimens, at least thirty (30) days before their introduction.

ARTICLE 8
SUSPENSION

1. Either Party may, at any time, suspend totally or partially the application of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The suspension shall be immediately communicated through diplomatic channels to the other Party, stating the date in which suspension or resumption of such suspension shall enter into effect.

ARTICLE 9
AMENDMENT

This Agreement may be amended by mutual consent by the Parties, formalized through written communications in which the date of its entry into force must be specified.

ARTICLE 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days following the date of the receipt of the latter notification on which the Parties have notified each other, through diplomatic channels, the fulfillment of the internal procedures required for that effect, and shall remain in force indefinitely.

2. Either Party, at any time, may state their decision to terminate this Agreement, through written notification to the other Party through diplomatic channels with ninety (90) days in advance.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement.

Signed in Mexico City, on April 14th, 2014, in two originals, each in the Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any differences of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

R.M. MARTY M. NATALEGAWA
Minister of Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA
Minister of Foreign Affairs